

Transformasi Tata Kelola Rekonstruksi: Mekanisme *Board of Peace* di Wilayah Konflik

Peronika Simanjuntak¹, Ardy Octavian², Carmelita Dalia³, Rara Novianty⁴,
Arnold Arswenda⁵, Rahmalia Wulan Azizah⁶, Trisni Salsa Ramadina⁷

¹⁶⁷Universitas Palangka Raya

²³⁴⁵Universitas Mulawarman

peronika.simanjuntak@fisip.upr.ac.id¹, aocavian0001@gmail.com²,
jeanjenlita@gmail.com³, noviantyrara14@gmail.com⁴,
arnoldkusuma@fisip.unmul.ac.id⁵, rahmaliawulan@fisip.unmul.ac.id⁶,
trisnisalsa@fisip.upr.ac.id⁷

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran strategis *Board of Peace* (BoP) sebagai model tata kelola berbasis jaringan dalam mempercepat pemulihan infrastruktur di wilayah konflik Gaza. Metode yang digunakan adalah studi kasus eksplanatif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen laporan global. Hasil penelitian membuktikan bahwa mekanisme "sinkronisasi partisipatif" pada BoP berhasil menggeser pola bantuan sentralistik menjadi sistem yang lebih responsif dan tepat sasaran, yang mengonfirmasi bahwa keterlibatan aktor lokal menjadi faktor krusial dalam keberhasilan rekonstruksi di lingkungan dengan polarisasi tinggi. Secara teoritis, hasil ini memperkuat argumen dalam Hybrid Peace Theory terkait pentingnya intermediasi institusional dalam manajemen konflik. Peneliti menyimpulkan bahwa perubahan paradigma ke arah model hibrida merupakan langkah esensial untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya pemangku kebijakan menyusun protokol transisi mandat yang fleksibel antara lembaga internasional dan masyarakat sipil. Sebagai saran, pengembangan riset selanjutnya diharapkan mampu memanfaatkan integrasi teknologi digital guna menciptakan sistem kolaborasi perdamaian yang lebih transparan dan inklusif.

Kata kunci: **Board of Peace; Rekonstruksi Pasca Konflik; Tata Kelola Jaringan; Hybrid Peace Theory; Gaza**

ABSTRACT

This study aims to evaluate the strategic role of the Board of Peace (BoP) as a network-based governance model in accelerating infrastructure recovery in the Gaza conflict zone. Utilizing an explanatory case study method with a qualitative approach, this research gathers data through in-depth interviews with relevant stakeholders and an analysis of global reports. The findings demonstrate that the "participatory synchronization" mechanism within the BoP successfully shifts rigid, centralized aid patterns into a more responsive and targeted system, confirming that active local engagement is a crucial factor

for successful reconstruction in highly polarized environments. Theoretically, these results reinforce the arguments within Hybrid Peace Theory regarding the importance of institutional intermediation in conflict management. The researcher concludes that a paradigm shift toward hybrid models is essential for building sustainable peace. The study implies that policymakers need to establish flexible mandate transition protocols between international institutions and civil society. Furthermore, future research is expected to leverage digital technology integration to create more transparent and inclusive peace collaboration systems.

Keyword: Board of Peace; Post-Conflict Reconstruction; Network Governance; Hybrid Peace Theory; Gaza

PENDAHULUAN

Konflik di Jalur Gaza bukan sekadar sengketa tanah yang terjadi dalam semalam. Ini adalah masalah mendalam yang berakar selama puluhan tahun, sejak 1948, yang kemudian diperparah oleh pendudukan wilayah tahun 1967 dan blokade ketat sejak 2007. Bagi dunia internasional, Gaza sering dilihat sebagai medan tempur, namun jika kita menelaah lebih dalam, wilayah ini sebenarnya sedang mengalami krisis tata kelola yang akut. Bayangkan sebuah tempat di mana akses air bersih, listrik, dan rumah sakit seringkali mati total bukan hanya karena serangan fisik, tetapi karena bantuan kemanusiaan yang masuk sering kali "tersangkut" di perbatasan akibat kerumitan politik. Laporan terbaru dari Al Jazeera (12 April, 2026) dan Reuters (15 April, 2026) menggambarkan betapa mirisnya kondisi infrastruktur di sana yang kini berada di titik nadir, membuat warga sipil benar-benar terjepit di antara ketidakpastian keamanan dan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup dasar.

Selama ini, banyak intervensi kemanusiaan yang dijalankan lembaga internasional seperti PBB masih bersifat top-down atau "atas ke bawah" (Weiss, 2018). Artinya, bantuan direncanakan dari markas besar tanpa benar-benar menyentuh kebutuhan nyata warga lokal. Padahal, menurut Ginty (2016) dan Paffenholz (2021), perdamaian yang berkelanjutan tidak bisa dipaksakan melalui cetak biru dari luar saja. Akibat dari pendekatan formalistik ini, muncul apa yang disebut sebagai krisis legitimasi: warga lokal merasa program bantuan tersebut jauh dari realitas hidup mereka, sehingga muncul "apatisme partisipasi" (Richmond, 2016). Ketidakefektifan ini menciptakan jurang (gap) yang nyata antara idealisme bantuan internasional dengan kenyataan pahit di lapangan (World Bank, 2023). Di tengah situasi tersebut, muncul inisiatif bernama *Board of Peace* (BoP) sebagai model tata kelola jaringan multi-aktor. Berbeda dengan mekanisme lama yang

kaku, BoP mencoba cara baru yang lebih segar dengan prinsip perdamaian hibrida (*hybrid peacebuilding*).

BoP tidak lagi memposisikan warga lokal sebagai objek yang hanya menerima barang, melainkan sebagai mitra strategis yang memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Ini adalah bentuk kolaborasi yang lebih cair, di mana kearifan lokal digabungkan dengan sumber daya global untuk memecah kebuntuan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis BoP dalam mempercepat rekonstruksi pasca konflik dan mengidentifikasi faktor penentu keberhasilannya di wilayah yang sangat terpolarisasi. Kami ingin melihat bagaimana model ini menyatukan pemerintah lokal, lembaga swadaya internasional, dan komunitas sipil ke dalam satu kerangka kerja yang transparan. Dengan memadukan perspektif institusionalisme dan teori perdamaian hibrida, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa rekonstruksi Gaza bukan hanya tentang membangun tembok, tetapi tentang membangun kembali kepercayaan masyarakat. Hasil riset ini diharapkan mampu memberikan tawaran baru bagi dunia internasional agar tidak lagi sekadar mengirim bantuan, tetapi membangun perdamaian yang benar-benar inklusif dan berkelanjutan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus eksplanatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dinamika rekonstruksi pasca konflik di Jalur Gaza. Fokus penelitian diarahkan pada peran *Board of Peace* dalam mempengaruhi efektivitas pembangunan perdamaian serta pemulihan sektor-sektor esensial. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci serta studi dokumentasi dari laporan lembaga internasional dan literatur ilmiah. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengacu pada kerangka *peacebuilding*, serta divalidasi melalui teknik triangulasi untuk memastikan kredibilitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil analisis mengungkapkan bahwa *Board of Peace* mampu mentransformasi pola koordinasi rekonstruksi yang dulunya bersifat sentralistik dan birokratis menjadi sebuah mekanisme kerja yang berbasis jaringan multi-aktor. Secara operasional, model ini terbukti meningkatkan efisiensi koordinasi yang lebih baik dibandingkan intervensi konvensional PBB, terutama dengan minimnya duplikasi mandat antar-lembaga (Paris, 2020). Temuan ini menjawab rumusan masalah mengenai daya dukung mekanisme hibrida dalam mengatasi kendala

rekonstruksi di wilayah terdampak konflik. Salah satu informan kunci dari praktisi kemanusiaan di Gaza mengungkapkan: "Dulu, kami harus menunggu persetujuan berjenjang yang memakan waktu berminggu-minggu untuk memperbaiki satu pipa air saja. Dengan BoP, keputusan diambil di tingkat lokal melalui konsensus cepat, sehingga respons terhadap kebutuhan dasar warga bisa dilakukan dalam hitungan hari, bukan bulan (Informan A Wawancara Pribadi, 2026)".

Perbandingan kinerja antara model konvensional dan mekanisme BoP disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Sintesis literatur dan data empiris penelitian.

Indikator Kinerja	Model Konvensional (PBB)	Mekanisme <i>Board of Peace</i>
Tingkat Inklusivitas Lokal	Rendah (Paris, 2020)	Tinggi (Donais & Knorr, 2023)
Kecepatan Alokasi Sumber Daya	Lambat (UNDP, 2023)	Cepat (Adara Relief, 2026)
Efektivitas Koordinasi	Terfragmentasi	Terpadu (Richmond, 2016)

Sumber: Paris, 2020; UNDP, 2023; Donais & Knorr, 2023; Adara Relief, 2026; Richmond; 2016

Keberhasilan *Board of Peace* dalam menyatukan berbagai aktor kemanusiaan menunjukkan keunggulan model tata kelola jaringan. Suryani dan Pratama (2026) dalam risetnya menegaskan bahwa kolaborasi aktor yang dinamis merupakan kunci utama untuk memecah kebuntuan birokrasi tradisional. Hal inilah yang mendasari mengapa koordinasi dalam mekanisme BoP jauh lebih terpadu dibandingkan dengan model konvensional yang cenderung terfragmentasi. Selain aspek koordinasi, tingkat inklusivitas lokal menjadi determinan utama keberhasilan rekonstruksi di Gaza. Sejalan dengan argumen Wahyudi dan Kusuma (2025) penguatan peran masyarakat dalam kebijakan publik pasca konflik adalah instrumen mutlak untuk menjamin keberlanjutan program. BoP telah mengadopsi prinsip tersebut dengan menempatkan masyarakat bukan sebagai objek bantuan, melainkan sebagai subjek yang menentukan arah rekonstruksi.

Deskripsi verbal data menunjukkan bahwa keterlibatan aktor lokal dalam BoP secara langsung berkorelasi dengan percepatan pemulihan sektor krusial, seperti fasilitas kesehatan dan akses air bersih. Keunggulan kecepatan alokasi

sumber daya pada mekanisme BoP didorong oleh eliminasi lapisan birokrasi yang berjenjang. Hal ini memungkinkan respons cepat terhadap kebutuhan mendesak tanpa harus menunggu verifikasi berlapis dari otoritas pusat internasional yang sering kali tidak memahami urgensi konteks lokal. Secara teoritis, terdapat korelasi positif yang signifikan antara partisipasi aktor lokal dalam prioritas rekonstruksi dengan ketahanan infrastruktur jangka panjang (Paffenholz, 2021), yang menegaskan bahwa integrasi local agency merupakan jawaban atas kegagalan model top-down di masa lalu (Hironaka, 2022). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa mengubah cara kerja dari sistem yang serba diatur pusat (sentralistik) ke sistem yang melibatkan pihak lokal (hibrida) bukan hanya sekadar urusan administrasi kantor belaka. Lebih dari itu, langkah ini adalah syarat mutlak jika kita benar-benar ingin membangun perdamaian yang kuat dan tahan lama di wilayah yang sedang dilanda konflik berat.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menemukan bahwa *Board of Peace* (BoP) bukan sekadar lembaga tambahan, melainkan sebuah terobosan dalam cara kita mengelola bantuan di wilayah konflik. Temuan terpenting dari riset ini, yang sekaligus menjadi hal baru (novelty), adalah adanya mekanisme "sinkronisasi partisipatif". Artinya, warga lokal tidak lagi hanya dianggap sebagai penerima bantuan, tetapi justru memegang kunci dalam menentukan kebutuhan apa yang paling mendesak. Hal ini sangat berbeda dengan pola lama lembaga internasional yang sering kali membuat keputusan dari kantor pusat (Paris, 2020), yang sering membuat bantuan menjadi kaku dan tidak tepat sasaran. Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat jelas kesenjangan kinerja yang tajam; sementara model PBB yang konvensional sering terhambat oleh birokrasi yang tumpang tindih (UNDP, 2023), mekanisme BoP justru mampu memangkas hambatan tersebut sehingga bantuan tersalurkan lebih cepat dan efektif (Adara Relief, 2026). Gap atau celah inilah yang menjelaskan mengapa selama ini banyak program rekonstruksi gagal bukan karena kurang dana, melainkan karena kebijakan yang dibuat di tingkat global tidak nyambung dengan realitas di lapangan.

Secara teoritis, hasil riset ini memperkuat teori perdamaian hibrida dari Ginty (2016) dan Paffenholz (2021). Jika banyak ahli sebelumnya hanya membahas teori perdamaian dalam tataran ide atau norma, penelitian ini membuktikan bahwa perdamaian hibrida bisa dipraktekkan secara nyata dalam perbaikan infrastruktur. Dengan menggunakan kacamata institusionalisme, kita bisa melihat bahwa BoP berhasil mendapatkan kepercayaan warga ("legitimasi") bukan karena kekuatan

politik, melainkan karena benar-benar memberikan hasil nyata seperti air bersih dan fasilitas kesehatan. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini dibanding studi-studi terdahulu (seperti Hironaka, 2022) kita berhasil merumuskan peran warga lokal ke dalam sebuah sistem jaringan kerja yang lebih stabil dan lincah.

Sebagai kesimpulan, riset ini menunjukkan bahwa beralih dari sistem yang serba diatur pusat ke sistem yang lebih kolaboratif (hibrida) bukan sekadar ganti aturan administratif. Ini adalah syarat wajib jika kita ingin membangun perdamaian yang benar-benar kokoh di wilayah yang konfliknya sangat tajam. Temuan ini memberikan kontribusi nyata bagi para praktisi di lapangan: bahwa kunci keberhasilan rekonstruksi di masa depan bukanlah tentang seberapa besar bantuan yang dikirim, melainkan tentang seberapa baik kita mampu melibatkan agensi lokal dalam prosesnya. Dengan model yang lebih adaptif dan manusiawi ini, kita memiliki harapan baru untuk membangun kembali Gaza dengan cara yang lebih inklusif dan tahan lama.

SIMPULAN

Secara substansial, penelitian ini menyimpulkan bahwa transisi model rekonstruksi menuju kerangka kerja *Board of Peace* (BoP) merupakan evolusi paradigma yang krusial dalam tata kelola perdamaian modern. BoP telah berhasil membuktikan bahwa nilai-nilai global dapat terakomodasi dalam konteks lokal tanpa mematikan agensi domestik. Hal ini secara signifikan memperkuat legitimasi dan rasa kepemilikan masyarakat dalam memprioritaskan pemulihan pasca konflik, sekaligus menjawab tantangan efektivitas rekonstruksi yang selama ini terhambat oleh pola birokrasi sentralistik. Implikasi dari temuan ini memperkokoh efikasi "intermediasi institusional" dalam kerangka teori perdamaian hibrida, di mana pendekatan kolaboratif-partisipatif terbukti jauh lebih relevan dibandingkan model *one-size-fits-all* dalam manajemen konflik yang kompleks. Kebijakan rekonstruksi di masa depan harus bergeser dari sekadar penyaluran bantuan terpusat menuju penguatan sistem tata kelola yang memberi ruang bagi aktor lokal sebagai mitra strategis yang setara.

Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal akses lapangan akibat kendala keamanan yang dinamis, temuan ini memberikan kontribusi nyata bagi para pengambil kebijakan untuk mulai merumuskan protokol transisi mandat yang lebih cair dan adaptif antara institusi global dan aktor lokal. Sebagai prospek pengembangan ke depan, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi penggunaan teknologi digital dalam manajemen kolaborasi lintas aktor. Pemanfaatan integrasi sistem digital berpotensi menciptakan "algoritma

perdamaian," sebuah mekanisme tata kelola yang lebih transparan dan inklusif, guna memetakan kebutuhan mendesak di lapangan secara *real-time* demi masa depan tata kelola konflik global yang lebih visioner dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adara Relief. (2026, April 15). Estimasi biaya rekonstruksi Gaza: Tantangan pemulihan infrastruktur pasca-konflik. <https://adararelief.org/artikel/rekonstruksi-gaza-2026>
- Al Jazeera. (2026, April 12). Gaza infrastructure reaches critical breaking point as humanitarian crisis deepens. <https://www.aljazeera.com/news/2026/04/12/gaza-infrastructure-reaches-critical-breaking-point>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Donais, T., & Knorr, A. (2023). *Local ownership and the practice of peacebuilding*. Routledge.
- Hironaka, M. (2022). *International interventions and local realities*. Cambridge University Press.
- Mac Ginty, R. (2016). *International peacebuilding and local resistance: Hybrid forms of peace*. Palgrave Macmillan.
- Mufidah, M., Yaqutunnafis, L., Nasuhi, M., & Hadi, S. (2026). Transformasi administrasi publik lokal berbasis kebijaksanaan lokal. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik*, 5(1), 30–40.
- Paris, R. (2020). The peacebuilding debate: Twenty years later. *International Peacekeeping*, 27(4), 517–535.
- Reuters. (2026, April 15). Aid distribution hurdles in Gaza persist amid ongoing political stalemate. <https://www.reuters.com/world/middle-east/2026/04/15/aid-distribution-hurdles-in-gaza-persist>
- Suryani, A., & Pratama, D. (2026). Dinamika kolaborasi aktor dalam tata kelola jaringan digital. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik*, 5(2), 55–68.
- Wahyudi, B., & Kusuma, R. (2025). Memperkuat peran masyarakat dalam kebijakan publik pascakonflik. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik*, 4(1), 12–25.
- Weiss, T. G. (2018). *What's wrong with the United Nations and how to fix it* (3rd ed.). Polity Press.